

**ANALISIS PENGARUH STRUKTUR
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PENERIMAAN OPINI AUDIT *NON-
UNQUALIFIED***

(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia 2001-2010)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :
Japarudin
C2C005295

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Japarudin
Nomor Induk Mahasiswa : C2C005295
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH STRUKTUR
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PENERIMAAN OPINI AUDIT NON-
UNQUALIFIED**
*(Studi pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia 2001-2010)*

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 25 Juni 2012

Tim Penguji

1. Drs. H. Tarmizi Achmad, M.B.A., Ph.D., Akt (.....)
2. Shiddiq Nur Rahardjo, S.E., M.Si., Akt (.....)
3. Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.E, M.Si., Akt (.....)

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Japarudin
Nomor Induk Mahasiswa : C2C005295
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis /Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH STRUKTUR**
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PEROLEHAN OPINI AUDIT NON-
UNQUALIFIED
(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2001-2010)
Dosen Pembimbing : Drs. H. Tarmizi Achmad, M.B.A.,Ph.D.,Akt

Semarang, 7 Juni 2012

Dosen Pembimbing,

(Drs. H. Tarmizi Achmad, M.B.A.,Ph.D.,Akt)

NIP. 19550418 198603 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Japarudin, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : *ANALISIS PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE, TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT NON-UNQUALIFIED* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2001-2010), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui, seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 7 Juni 2012
Yang membuat pernyataan,

(Japarudin)
C2C005295

ABSTRACT

This study examines the influence of corporate governance structure to audit qualification in Indonesian listed firms. Blockholder ownership, managerial ownership, board independency, audit committee and board size are estimated to have relationship on probability of given non-unqualified opinion. This research also consider sales, profitability, leverage and liquidity as control variables.

This study used data from financial reports manufacturer companies listed in BEI during 2001-2010. Samples were obtained by purposive sampling judgement. Logistic regression analysis with matched pair design is purposed to test the research problems on 92 non-unqualified opinion companies and their 92 paired samples.

The result of this study indicates that blockholder ownership, managerial ownership, board independency, audit committee and board size didn't significant impact on probability of given non-unqualified audit opinion. On the other hand, sales, profitability and leverage have a significant impact on probability of given non-unqualified audit opinion.

Keywords: corporate governance, agency problem, audit opinion

ABSTRAKSI

Penelitian ini menguji pengaruh struktur *corporate governance* terhadap kualifikasi audit pada perusahaan-perusahaan publik Indonesia. Konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, independensi dewan, komite audit dan ukuran dewan diperkirakan memiliki hubungan terhadap kemungkinan perusahaan menerima opini audit *non-unqualified*. Penelitian ini juga mempertimbangkan penjualan, profitabilitas, leverage, dan likuiditas sebagai variabel kontrol.

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang listing di BEI pada tahun 2001-2010. Sampel penelitian diperoleh dengan metode pengambilan *purposive sampling*. Analisis regresi logistik dengan metode *matched pair design* digunakan untuk menguji masalah penelitian pada 92 perusahaan dengan opini audit *non-unqualified* dan 92 sampel pasangan.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, independensi dewan, komite audit, dan ukuran dewan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan menerima opini audit *non-unqualified*. Di sisi lain variabel kontrol yaitu *sales*, rasio profitabilitas dan *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan menerima opini audit *non-unqualified*.

Kata kunci : *corporate governance*, hubungan keagenan, opini audit

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”ANALISIS PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT *NON-UNQUALIFIED* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2001-2010)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomika dan Bisnis pada program Akuntansi Universitas Diponegoro.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terkira atas segala bantuan serta bimbingannya selama pembuatan skripsi, kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Msi.,Akt.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafrudin, Msi, Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA, Akt, Ph.D, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan tambahan ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Shiddiq Nur Rahardjo, SE,M.Si,Akt selaku dosen wali yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan kelancaran selama perkuliahan.
5. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang sudah memberikan banyak ilmu yang berharga bagi penulis.
6. Teruntuk kedua orang tua kami yang sangat kami hormati dan kami muliakan, Bapak Tedjo Pramono dan Ibu Parni (almh). Rasa terima kasih tak terhingga atas kasih sayang yang telah diberikan bagi jiwa yang rapuh ini.
7. Teruntuk Budhe Ngatiyem yang telah begitu sabar menggantikan sosok ibu bagi kami sedari kecil, terimakasih atas doa dan nasihat yang diberikan.

8. Kakak-kakakku : Mbak Tugi, Mbak Asih dan Mas Nardi. Terimakasih atas dukungan yang diberikan.
9. Salam takdzim teruntuk guru-guru kami; K.H. Machali, K.H. Farhan, Ustadz Nasihin, Pak Supriyono, Bu Prapti (almh.), Bu Tatik, Pak Mushlich (alm.), Pak Riyanto, Pak Hendri, Bu Anik, Pak Titis, Pak Sutikno, Bu Nikmah, Pak Anas, Bu Retno, dll. Kalian adalah mata air ilmu yang mengobati dahaga kami.
10. Salam ngungkrung teruntuk teman-teman satu markas Granada-Simbah Broto: Mas Khamim, Mas Dudi, Mas Uki, Mas Apiip, Galih, Dwi, Sam, Topan, Alwan, Afnan , Dedi, Mas Imam, Mas Pras, Hendi , Andi, Mas Toni, Mas Fany, Mas Ebi, Mas Adot, Mas Adit, Faizal, Dany, Mas Bambang, MasTino, Mas Ucok, Mas Ojan, Mas Saiful, Luhur, Dewa, Kunari, Sukir, Haris, Bangkit, Dani, Angga. Aku ngungkrung leek, suwe iso edan aku.
11. Teman-teman Akuntansi angkatan 2005 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi teman baik kami semoga ada waktu untuk kita bersama kembali
12. Teman KKN :Bos Ghofur, Taufik, Monisa, Chika dan Minuk. Serta keluarga Pak Inggi, Bu Tiah, Pak Busyiri, Pak Agung, Kang Jalal, Kang Hasan, Mas Alex dan Mbak Wulan.Terimakasih telah mengurus anak pesakitan ini.
13. Dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Akhir kata, dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunannya, maka penulis berharap adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 7 Juni 2012

Japarudin

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 9 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| 2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu..... | 11 |
| 2.1.1 <i>Agency Theory</i> dan <i>Corporate Governance</i> | 11 |
| 2.1.2 Karakteristik Perusahaan Publik di Indonesia..... | 13 |
| 2.1.3 Opini Audit..... | 17 |
| 2.1.4 Penelitian Terdahulu..... | 24 |
| 2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis..... | 28 |
| 2.2.1 Konsentrasi Kepemilikan..... | 28 |
| 2.2.2 Kepemilikan Manajerial..... | 30 |
| 2.2.3 Independensi Dewan Komisaris..... | 31 |

| | |
|--|----|
| 2.2.4 Komite Audit..... | 33 |
| 2.2.5 Ukuran Dewan Komisaris..... | 37 |
| 2.3 Model Penelitian..... | 38 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 40 |
| 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel..... | 40 |
| 3.1.1 Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)..... | 40 |
| 3.1.1.1 Konsentrasi Kepemilikan..... | 40 |
| 3.1.1.2 Kepemilikan Manajerial..... | 41 |
| 3.1.1.3 Independensi Dewan..... | 41 |
| 3.1.1.4 Komite Audit..... | 42 |
| 3.1.1.5 Ukuran Dewan..... | 42 |
| 3.1.2 Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>)..... | 42 |
| 3.1.3 Variabel Kontrol..... | 43 |
| 3.1.3.1 Ukuran Perusahaan..... | 44 |
| 3.1.3.2 Profitabilitas..... | 44 |
| 3.1.3.3 Leverage..... | 44 |
| 3.1.3.4 Likuiditas..... | 45 |
| 3.2 Populasi dan Sampel..... | 46 |
| 3.2.1 Populasi..... | 46 |
| 3.2.2 Sampel..... | 46 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data..... | 47 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data..... | 48 |
| 3.5 Metode Analisis..... | 48 |
| 3.5.1 Analisis Deskriptif..... | 48 |
| 3.5.2 Analisis Regresi Logistik..... | 49 |
| | |
| BAB IV HASIL DAN ANALISIS..... | 52 |
| 4.1 Deskripsi Objek Penelitian..... | 52 |
| 4.2 Analisis Statistik Deskriptif..... | 55 |
| 4.3 Pengujian Kelayakan Model..... | 60 |

| | |
|---|----|
| 4.3.1 Hasil Uji G..... | 60 |
| 4.3.2 <i>Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test</i> | 61 |
| 4.3.3 <i>Nagelkerke's R Square</i> | 62 |
| 4.4 Matrik Klasifikasi..... | 62 |
| 4.5 Uji Hipotesis..... | 63 |
| 4.7 Pembahasan..... | 66 |
| | |
| BAB V PENUTUP..... | 74 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 74 |
| 5.2 Implikasi Penelitian..... | 75 |
| 5.3 Saran..... | 76 |
| | |
| Daftar Pustaka..... | 77 |
| Lampiran-lampiran..... | 80 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|-----------|---|
| Tabel 2.1 | Ringkasan Penelitian Terdahulu.....27 |
| Tabel 4.1 | Penentuan Sampel Peneltian.....54 |
| Tabel 4.2 | Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....56 |
| Tabel 4.3 | Analisis Deskriptif Variabel Opini Audit.....59 |
| Tabel 4.4 | Hasil Uji G.....60 |
| Tabel 4.5 | Hasil pengujian <i>Hosmerand Lemeshow's Goodness of Fit Test</i>61 |
| Tabel 4.6 | Hasil Pengujian <i>Nagelkerke's R Square</i>62 |
| Tabel 4.7 | Matrik Klasifikasi.....63 |
| Tabel 4.8 | Hasil Uji Hipotesis.....64 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 2.1 | Struktur Hubungan antara Akuntan Publik, Manajemen dan Pemakai Eksternal Laporan Keuangan..... | 18 |
| Gambar 2.2 | Sistematika Perumusan Opini Audit..... | 23 |
| Gambar 2.3 | Model Penelitian..... | 39 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|---|---------|
| Lampiran A Daftar Sampel Penelitian..... | 80 |
| Lampiran B Analisis Statistik Deskriptif..... | 85 |
| Lampiran C Analisis Regresi Logistik..... | 87 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan sebagai entitas bisnis yang bergantung pada publik, berkewajiban untuk memberikan informasi yang relevan kepada publik. Informasi tersebut berguna untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Bentuk dari informasi yang disampaikan ini diantaranya berupa laporan keuangan beserta laporan auditor independen. Ketentuan tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Bapepam Nomor Kep-36/PM/2003 dan Peraturan Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 bahwa perusahaan yang telah *listing* di bursa efek diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku dan telah diaudit oleh akuntan publik.

Laporan keuangan merupakan instrumen penting untuk mengukur pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dikelolanya. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 1994, menyebutkan bahwa laporan audit merupakan jaminan atas kualitas laporan keuangan perusahaan. Tolok ukur kualitas laporan keuangan biasanya dilihat dari jenis opini yang diberikan auditor dalam laporan audit. Semakin baik opini audit yang didapat perusahaan, maka semakin besar pula kepercayaan yang diperoleh perusahaan untuk memberikan *return* yang cukup bagi investor. Dengan demikian, opini audit atas laporan

keuangan merupakan salah satu pertimbangan yang penting bagi investor dalam mengambil keputusan berinvestasi (Levitt, 1998 dalam Fany dan Saputra, 2005).

Dalam prakteknya, tak jarang auditor mendapat tekanan dari pihak manajemen untuk mengeluarkan opini bersih, yaitu opini wajar tanpa pengecualian/*unqualified opinion* (Tuanakotta, 2011). Dari sisi manajemen, dengan semakin baiknya opini audit yang diterima perusahaan, maka kepercayaan investor atas pertanggung jawaban manajemen semakin besar. Alasan tersebut mendorong manajemen untuk selalu berusaha mendapatkan opini audit yang terbaik, terlepas dari kinerja yang sesungguhnya dicapai dan bisa saja memberi informasi yang menyesatkan bagi investor. Hal ini sesuai dengan konsep *agency theory* yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Selanjutnya, De Fond (1992) berpendapat bahwa permintaan akan kualitas audit merupakan sebuah fungsi dari konflik keagenan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham.

Berbagai skandal korporasi yang terjadi dan kerugian yang ditimbulkan telah cukup menjelaskan bentuk dan akibat yang ditimbulkan dari konflik keagenan. Untuk itu diperlukan suatu struktur terpadu yang mampu menjembatani berbagai kepentingan dan mengendalikan konflik keagenan. *Corporate governance* merupakan konsep yang ditawarkan untuk mengurangi konflik keagenan tersebut. *Economic Co-operation and Development* (OECD) 2004, dan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) 2001, mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta

para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Cadbury, 1992). Manfaat yang diperoleh dengan adanya sistem *corporate governance* yang baik adalah pada fungsionalisasi dan perkembangan pasar modal, serta alokasi sumber daya karena mengurangi biaya monitoring oleh shareholder dan biaya auditing (Ballesta dan Meca, 2005).

Pada sebagian besar literatur *corporate governance*, para peneliti cenderung berfokus pada pengaruh pemilikan perusahaan pada nilai pasar, manajemen laba, pengungkapan sukarela dan kinerja perusahaan. Namun terdapat fenomena lain yang menarik untuk diperhatikan dan dipelajari lebih lanjut. Fenomena tersebut ialah hubungan karakteristik *corporate governance* dan sistem hukum (*legal system*) bagi perlindungan investor dapat juga mempengaruhi peran dari auditor tetap dan permintaan akan kualitas audit (Piot, 2001). *Statement of Auditing Standards* (SAS) No 55 dari *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) 1988, mengenai struktur pengendalian internal dalam sebuah laporan keuangan audit yaitu pada literatur wewenang audit menyiratkan pernyataan yang tegas bahwa karakteristik *corporate governance* terutama dewan komisaris direktur diharapkan mempunyai suatu hubungan yang signifikan dengan kualitas dari praktek pelaporan keuangan. Sehingga terdapat anggapan bahwa dengan penerapan *corporate governance* yang tepat, mampu meminimalisir tekanan dari pihak manajemen untuk menghasilkan opini yang bersih dari benturan kepentingan.

Mencermati fenomena di atas, maka perlu untuk mengetahui sejauh mana relevansi struktur *corporate governance* dalam mempengaruhi kualitas praktek pelaporan keuangan di Indonesia, khususnya terkait kemungkinan memperoleh opini audit. Hal ini didasari anggapan bahwa opini audit mencerminkan kualitas dari pelaporan keuangan perusahaan.

Struktur *corporate governance* yang dipertimbangkan dalam penelitian ini antara lain konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, independensi dewan komisaris, komite audit dan ukuran dewan komisaris. Selain itu dipertimbangkan pula ukuran perusahaan, rasio profitabilitas, *leverage* dan likuiditas sebagai variabel kontrol yang mempengaruhi kualifikasi audit. Oleh karena itu melalui implementasi sistem *corporate governance* yang baik, diharapkan dapat mengurangi tekanan dari pihak manajemen dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Disisi lain, melalui pemahaman atas faktor-faktor terkait dengan kualifikasi audit dapat membantu auditor dalam menilai resiko perikatan termasuk proses perencanaan (Dopuch *et al*, 1987).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ballesta dan Meca (2005) yang berjudul “*Audit Qualification and Corporate Governance in Spanish Listed Firms*” di Spanyol. Penelitian terdahulu tersebut dipilih karena terdapat kesamaan dengan kondisi di Indonesia dari segi *legal system*. Untuk mencoba membedakan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan variabel independensi dewan komisaris dan komite audit. Penelitian ini juga menghapus variabel anggota dewan komisaris yang berasal dari keluarga. Hal ini dikarenakan terdapatnya kesulitan untuk memperoleh informasi tentang anggota

dewan komisaris yang berasal dari keluarga pada konteks pasar modal di Indonesia.

Secara eksplisit, penelitian ini menekankan pada hasil akhir dari proses audit, yaitu opini audit yang diberikan, dengan pusat perhatian pada pengguna laporan keuangan. Dalam prakteknya seringkali auditor mendapat tekanan dari manajemen untuk menghasilkan opini yang wajar. Harapan ini dapat dinyatakan secara terbuka kepada auditor atau merupakan bagian dari suatu perjanjian perikatan antara klien dengan pihak ketiga (Tuanakotta, 2011). Sebuah struktur *corporate governance* yang baik dapat membantu auditor mengurangi tekanan tersebut, sehingga penelitian ini memperkirakan bahwa dibawah karakteristik *corporate governance* yang benar, auditor lebih dapat mengurangi tekanan manajemen apapun untuk menghasilkan opini yang bersih (Ballesta dan Meca, 2005).

Penelitian ini menawarkan pemahaman baru dalam hal hubungan antara *corporate governance* dan perolehan opini audit dengan menggunakan data dari pasar modal di Indonesia, sebuah negara yang diklasifikasikan sebagai *French Civil Law* yang dicirikan oleh kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan keluarga, perlindungan investor yang rendah, dan piramida grup dan serta memiliki komposisi dewan komisaris yang tidak semuanya independen (La Porta *et al*, 1997).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini mengambil judul “**Analisis Pengaruh Stuktur *Corporate Governance* Terhadap Penerimaan Opini Audit *Non-Unqualified*** (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2001-2010)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana struktur *corporate governance* berupa konsentrasi kepemilikan memiliki hubungan dengan kemungkinan perusahaan memperoleh opini audit *non-unqualified*?
2. Bagaimana struktur *corporate governance* berupa kepemilikan manajerial memiliki hubungan dengan kemungkinan perusahaan memperoleh opini audit *non-unqualified*?
3. Bagaimana struktur *corporate governance* berupa independensi dewan komisaris komisaris memiliki hubungan dengan kemungkinan perusahaan memperoleh opini audit *non-unqualified*?
4. Bagaimana struktur *corporate governance* berupa komite audit memiliki hubungan dengan kemungkinan perusahaan memperoleh opini audit *non-unqualified*?
5. Bagaimana struktur *corporate governance* berupa ukuran dewan komisaris komisaris memiliki hubungan dengan kemungkinan perusahaan memperoleh opini audit *non-unqualified*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran *corporate governance* terhadap audit eksternal di Indonesia. Dengan perhatian khusus pada akhir proses

audit, yaitu jenis opini yang diberikan auditor. Penelitian ini hendak menguji apakah melalui penerapan *corporate governance* yang benar mampu memberikan peluang yang lebih besar bagi perusahaan untuk menerima opini *unqualified*.

Adapun secara rinci, tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis hubungan antara struktur *corporate governance* berupa konsentrasi kepemilikan terhadap kemungkinan perusahaan memperoleh opini audit *non-unqualified*.
2. Untuk menganalisis hubungan antara struktur *corporate governance* berupa kepemilikan manajerial terhadap kemungkinan perusahaan memperoleh opini audit *non-unqualified*.
3. Untuk menganalisis hubungan antara struktur *corporate governance* berupa independensi dewan komisaris komisaris terhadap kemungkinan perusahaan memperoleh opini audit *non-unqualified*.
4. Untuk menganalisis hubungan antara struktur *corporate governance* berupa komite audit terhadap kemungkinan perusahaan memperoleh opini audit *non-unqualified*.
5. Untuk menganalisis hubungan antara struktur *corporate governance* berupa ukuran dewan komisaris komisaris terhadap kemungkinan perusahaan memperoleh opini audit *non-unqualified*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dalam kaitan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini dapat melengkapi penelitian terdahulu mengenai hubungan antara *corporate governance* dan kualifikasi audit. Kedepan penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan memberikan kontribusi pada pengembangan model *corporate governance*. Serta dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan, bahan diskusi, dan bahan kajian lanjut bagi pembaca tentang pengaruh *corporate governance* terhadap penerimaan opini audit.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Akuntan Publik, menurut Dopuch (1987), jenis penelitian ini dapat membantu Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam mengidentifikasi klien dan untuk menyaring klien yang potensial. Selain itu, penelitian ini dapat membantu Kantor Akuntan Publik dalam penilaian resiko perikatan termasuk proses perencanaan serta meningkatkan kualitas dari jasa auditing
- b. Bagi investor dan calon investor, sedikit penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi tambahan informasi bagi investor maupun calon investor agar lebih cermat dalam menilai perusahaan terkait keputusan investasi yang akan dilakukan.
- c. Bagi Manajemen dan Pemilik Perusahaan, sedikit penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menyikapi konflik agensi dengan lebih bijak sehingga dapat mewujudkan sistem *corporate*

governance yang tangguh sehingga mampu memberikan informasi yang relevan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

- d. Bagi Regulator Pasar Modal, memberi masukan bagi pihak regulator untuk lebih melakukan pengawasan pada karakteristik *corporate governance*. Sebagai contoh pada perusahaan-perusahaan konglomerasi, dengan kepemilikannya terkonsentrasi (*blockholder*) di satu atau sedikit pihak.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut

- **BAB I**

Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah yang diambil, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

- **BAB II**

Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitian terdahulu *corporate governance*, pasar audit di Indonesia dan hubungan antara *corporate governance* dan opini audit. Dalam bagian ini juga dikemukakan mengenai kerangka pemikiran dan hipotesis.

- **BAB III**

Metode Penelitian merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana penelitian ini dilaksanakan secara operasional. Dalam bagian ini

diuraikan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

- BAB IV

Hasil dan Pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

- BAB V

Kesimpulan, implikasi dan saran penelitian merupakan bagian akhir yang mendeskripsikan secara ringkas hasil-hasil penelitian dan tinjauan penelitian kedepan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 *Agency Theory* dan *Corporate Governance*

Hubungan keagenan merupakan pendekatan yang sering digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan berbagai kecurangan korporasi. Teori agensi (*agency theory*) dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini mendefinisikan hubungan agensi sebagai suatu kontrak dimana principal (pemegang saham) mempekerjakan agen (manajemen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, manajemen membutuhkan sejumlah besar informasi agar dapat menghasilkan keputusan yang tepat. Hal tersebut memungkinkan manajemen untuk memiliki akses informasi yang lebih luas daripada investor. Sehingga dari sini timbulah ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*), yaitu situasi di mana manajemen memiliki informasi yang berbeda (yang lebih baik) mengenai prospek perusahaan daripada yang dimiliki investor.

Dalam situasi ketidakseimbangan informasi tersebut, jika agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka akan terjadi benturan kepentingan. Sehingga terdapat alasan untuk percaya bahwa agen tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal. Pemikiran bahwa pihak manajemen dapat melakukan

tindakan yang hanya memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri didasarkan pada suatu asumsi yang menyatakan setiap orang mempunyai perilaku yang mementingkan diri sendiri atau *self-interested behaviour*. Keinginan, motivasi dan utilitas yang berlainan antara manajemen dan pemegang saham menimbulkan kemungkinan manajemen bertindak merugikan pemegang saham, antara lain berperilaku tidak etis (*moral hazard*) dan cenderung melakukan kecurangan akuntansi.

Kasus Enron telah menjadi bukti nyata yang menunjukkan bagaimana kecurangan manajemen tersebut dilakukan. Besarnya dampak multidimensi dan kerugian yang ditimbulkan memberikan pelajaran bagi pihak berkepentingan untuk serius membangun suatu sistem yang mampu meningkatkan keselarasan tujuan (*goal congruence*) antara pihak-pihak yang berkepentingan dan meminimalisir konflik keagenan. Salah satu cara yang cukup efisien dalam rangka untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan, maka diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda.

Corporate Governance merupakan konsep yang seringkali ditawarkan untuk meminimalisir dampak buruk masalah keagenan serta meningkatkan *goal congruence* diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) 2004 dan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) 2001, *corporate governance*

meliputi seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta peran pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* merupakan serangkaian mekanisme yang digunakan untuk membatasi timbulnya masalah keagenan. Mekanisme tersebut dapat berupa mekanisme internal yaitu; struktur kepemilikan, struktur dewan komisaris, kompensasi eksekutif, komite audit, dan mekanisme eksternal yaitu; pengendalian oleh regulator pasar, kepemilikan institusional, dan pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 2001, merumuskan tujuan dari corporate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). *Corporate governance* yang mengandung empat unsur penting yaitu keadilan, transparansi, pertanggungjawaban dan akuntabilitas, diharapkan dapat menjadi suatu jalan dalam mengurangi konflik keagenan. Selain itu, sistem *corporate governance* yang baik dapat memberikan perlindungan efektif kepada pemegang saham dan kreditur, sehingga mereka dapat yakin bahwa *return* atas investasi mereka akan bernilai tinggi

2.1.2 Karakteristik Perusahaan Publik di Indonesia

Seperti halnya perusahaan di Asia pada umumnya, perusahaan Indonesia memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda. Kepemilikan terkonsentrasi dan

kepemilikan keluarga telah menjadi ciri utama dalam struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia (Hardinata, 2008). Penelitian yang dilakukan La Porta, *et al* (1997), menguji peraturan hukum yang mencakup proteksi terhadap pemegang saham dan kreditur perusahaan, asal mula dari peraturan tersebut dan kualitas pelaksanaannya di 49 negara. Hasil yang dicapai menunjukkan tiga tipe kelompok negara yang berbeda, dengan tingkat perlindungan hukum bagi investor dari kuat-sedang-lemah. Kelompok-kelompok tersebut antara lain adalah negara-negara *Common Law*, *German and Scandinavian Civil Law* dan *French Civil Law*. Dari ketiga kelompok negara tersebut, Indonesia termasuk dalam kelompok ketiga yaitu *French Civil Law*.

Karakteristik umum dari kelompok negara *French Civil Law* (La Porta *et al*, 1997) dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Memiliki perlindungan hukum yang buruk bagi investor dan perkembangan pasar modal yang relatif rendah. Situasi tersebut berdampak pada menguatnya konsentrasi kepemilikan jika dibandingkan dengan negara-negara *Common Law*. Karena konsentrasi kepemilikan yang kuat akan menjadi pengganti bagi perlindungan hukum. Hal itu disebabkan oleh kepentingan pemegang saham yang berharap untuk menerima *return* dalam investasi mereka. Konsentrasi kepemilikan yang kuat menjadi alat yang efektif untuk memonitor tindakan manajemen.
- b. Menganut kebijakan deviden yang bersifat wajib. Di Indonesia sendiri, perusahaan wajib membagikan deviden minimal satu kali dalam tiga tahun.

- c. Memberi perlindungan yang paling lemah bagi kreditur
- d. Investor di negara-negara *French Civil Law* mendapat perlindungan yang buruk, baik dari hukum dan sistem *enforcement*-nya.
- e. Cenderung memiliki konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi dan biasanya memiliki shareholder inti yang stabil. Dimana konsentrasi kepemilikan saham pada perusahaan-perusahaan besar berhubungan negatif dengan proteksi investor.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh La Porta, *et al* (1998), berusaha untuk mengidentifikasi pemegang saham kendali dari perusahaan-perusahaan besar di 27 negara dengan ekonomi yang maju. Dengan menggunakan data berupa struktur kepemilikan pada perusahaan-perusahaan tersebut, hasil yang dicapai menunjukkan bahwa secara relatif sedikit dari perusahaan-perusahaan tersebut memiliki struktur kepemilikan tersebar. Namun hal itu dikecualikan untuk negara dengan ekonomi yang memiliki perlindungan pemegang saham yang sangat baik. Lebih jauh, kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut secara khas dikendalikan oleh keluarga atau negara. Pengendalian ekuitas oleh lembaga keuangan atau perusahaan-perusahaan secara tersebar adalah tidak lazim ditemukan.

Merujuk pada penelitian Crespi-Caldera dan Garcia-Cestona (2004) mengenai struktur kepemilikan perusahaan di Spanyol, Indonesia memiliki karakteristik yang kurang lebih sama. Hal ini dicirikan dengan bentuk kepemilikan yang mendominasi di Indonesia berupa *legal control*, yaitu satu atau sebuah kelompok dari pemegang saham yang mengendalikan lebih dari 50% dari

suara dalam rapat umum tahunan. Stakeholder utama di banyak perusahaan di Indonesia antara lain berasal dari keluarga, bank, dan berbagai perusahaan industri yang berperan utama dalam struktur kepemilikan yang kemudian akan mempengaruhi *corporate governance* nya. Selain itu kepemilikan negara masih sungguh relevan di kebanyakan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, terutama pada sektor usaha yang berpengaruh kuat terhadap kebutuhan publik (misalnya, pada sektor minyak, perkebunan, energi dan jasa telekomunikasi). Namun perkembangan bisnis dan keterbukaan pasar telah memperbesar keran investasi, sehingga keikutsertaan negara telah sedikit demi sedikit berkurang dan digantikan oleh investor lain melalui proses privatisasi (Hardinata, 2008).

Classens *et al* (1999b dan 2000) dalam Hardinata, (2008) menunjukkan struktur piramidal banyak dipakai pemegang saham pengendali di Indonesia. Struktur tersebut memungkinkan sebuah perusahaan pengendali berada di puncak dengan mengendalikan satu atau lebih anak perusahaan. Konsekuensinya kepemilikan tidak langsung menjadi suatu alat yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dan individu-individu untuk memberikan kekuatan memilih yang lebih besar daripada kepemilikan langsung. Anggota dewan utamanya mewakili shareholder pengendali, dimana shareholder minoritas tidak diwakili dengan baik.

Pemegang saham mayoritas sebenarnya memiliki kemampuan monitoring yang lebih kepada perusahaan dan manajemen, yang selanjutnya akan memberikan pengaruh positif bagi *corporate governance*. Namun sebaliknya, pemegang saham mayoritas juga berpotensi memiliki konflik dengan pemegang saham lain, khususnya minoritas. Konflik ini terjadi ketika pemegang saham

mayoritas memanfaatkan kekuatannya untuk kepentingan yang sebenarnya merugikan pemegang saham minoritas. Misalnya pemegang saham mayoritas melakukan eksploitasi atas perusahaan yang dikontrolnya, dengan cara membebankan biaya yang juga ditanggung pemegang saham minoritas (La Porta *et al*, 1998). Kondisi lemahnya *coporate governance* tersebut berimplikasi pada rendahnya valuasi atas nilai saham yang dimiliki perusahaan bersangkutan, terbatasnya akses ke pasar saham dan kesulitan mewujudkan rencana bisnis serta mengakses potensi pasar yang ada diluar (Hardinata, 2008).

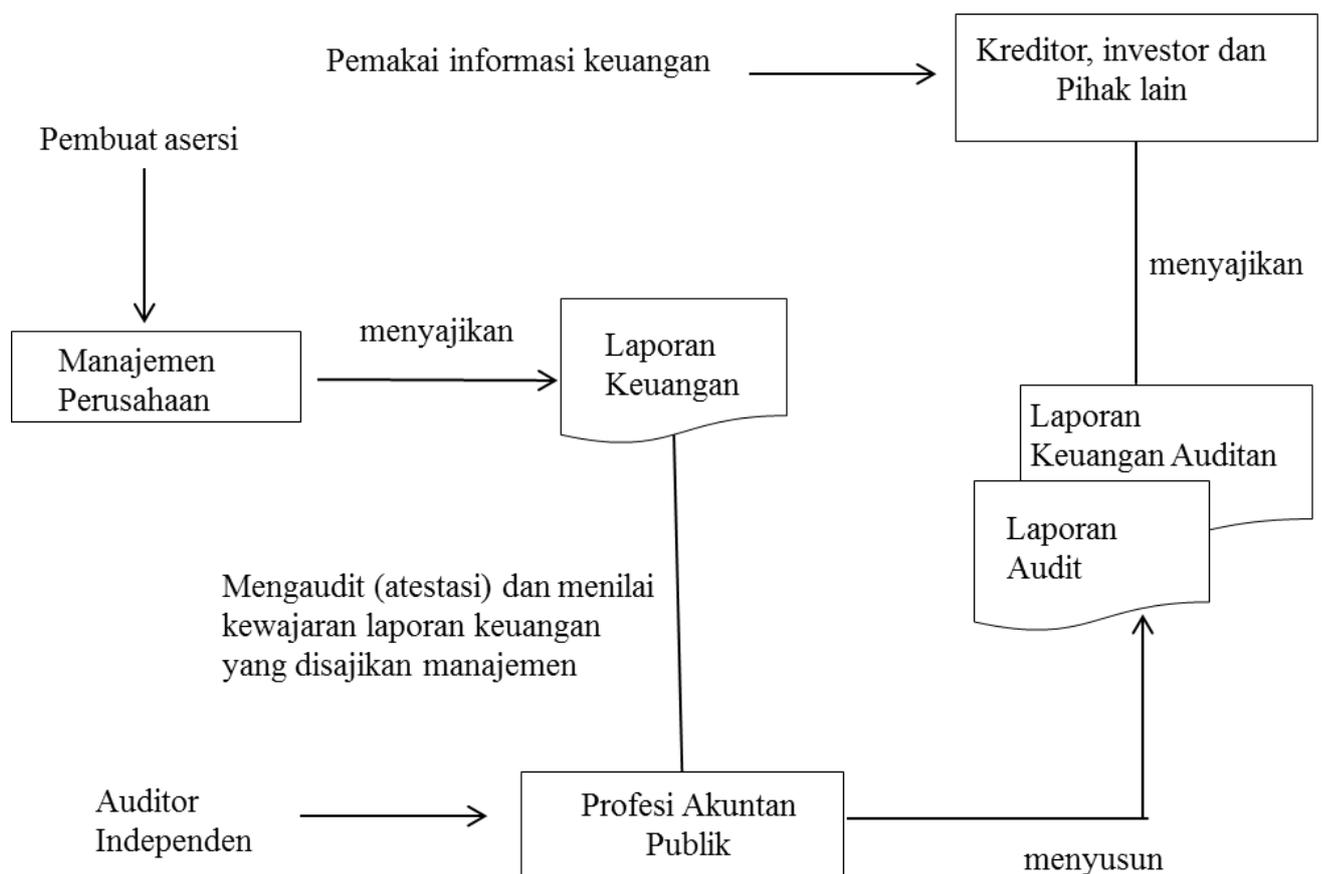
2.1.3 Opini Audit

Sarbanes-Oxley Act (2002) memberi pengertian audit sebagai pengujian laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh satu kantor akuntan publik yang independen dengan berpedoman pada standar yang berlaku dimaksudkan untuk memberikan opini atas laporan keuangan tersebut.

Auditor diperlukan karena pemegang saham tahu mereka tidak bisa mempercayai perusahaan, karena jelas ada insentif yang terlalu besar untuk memberikan informasi yang menyesatkan walaupun sudah ada hukum yang diberlakukan atas tindak penipuan. Secara alamiah memang terjadi ketimpangan informasi (*assymmetric of information*) dimana manajer mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui pemegang saham. Auditor semestinya memastikan bahwa angka-angka yang dilaporkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Standar dan praktik akuntansi yang baik mengurangi informasi asimetris dan membantu pasar modal berjalan lebih baik (Stiglitz, 2003).

Hasil akhir dari keseluruhan proses audit ialah dikeluarkannya laporan audit. Laporan audit adalah dokumen yang disiapkan dalam audit yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan auditee terhadap standar yang telah ditetapkan (*Sarbanes-Oxley Act, 2002*).

Gambar 2.1
Struktur Hubungan antara Akuntan Publik, Manajemen dan Pemakai Eksternal Informasi Keuangan



Sumber : Arens and Loebecke (2003) dalam Tuanakotta (2011)

Laporan audit merupakan representasi atas audit yang dilakukan terhadap laporan keuangan historis perusahaan. Laporan keuangan yang dimaksud meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan semua catatan kaki serta penjelasan dan tambahan informasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyajian laporan keuangan. Dalam laporan audit, auditor wajib memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang dimaksud adalah mengenai apakah laporan keuangan entitas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (Standar Profesional Akuntan Publik, 1994; dalam Mulyadi, 2002).

Mulyadi (2002) menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga unsur penting dalam laporan audit bentuk baku, antara lain paragraf pengantar, paragraf lingkup dan paragraf pendapat. Pada paragraf pertama yaitu paragraf pengantar, berisi penjelasan objek yang menjadi sasaran audit, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, serta tanggung jawab auditor. Selanjutnya paragraf lingkup audit berisi pernyataan auditor bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang berlaku serta pernyataan keyakinan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit tersebut mampu memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk menyatakan pendapat. Di paragraf terakhir yaitu paragraf pendapat, memuat opini auditor atas kewajaran laporan keuangan entitas yang bersangkutan. Oleh karena opini audit merupakan langkah terakhir dari keseluruhan proses audit, maka opini yang diberikan harus berdasar pada keyakinan profesional auditor (Arens, 1996).

Menurut Mulyadi (2002), opini Auditor terdiri atas 5 jenis yang dapat diringkas sebagai berikut :

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat jenis ini diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika memenuhi kondisi-kondisi berikut :

1. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia
2. Perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari periode satu ke periode lain telah cukup dijelaskan
3. Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia

b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)

Dalam keadaan tertentu yang memerlukan penjelasan, namun secara umum laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha entitas yang bersangkutan, maka auditor dapat menambahkan paragraf penjelas dalam laporan auditnya. Paragraf penjelas dicantumkan pada paragraf keempat, dibawah paragraf pendapat.

Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit adalah:

1. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum
 2. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas
 3. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan komisaris Standar Akuntansi Keuangan
 4. Penekanan atas suatu hal
 5. Laporan audit yang melibatkan auditor lain
- c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila entitas yang bersangkutan menyajikan secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan.

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan oleh auditor jika dalam auditnya auditor menjumpai paling sedikit satu dari kondisi dibawah ini :

1. Lingkup audit dibatasi oleh klien
2. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor
3. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum
4. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten

d. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Bertolak belakang dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan entitas yang bersangkutan tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien.

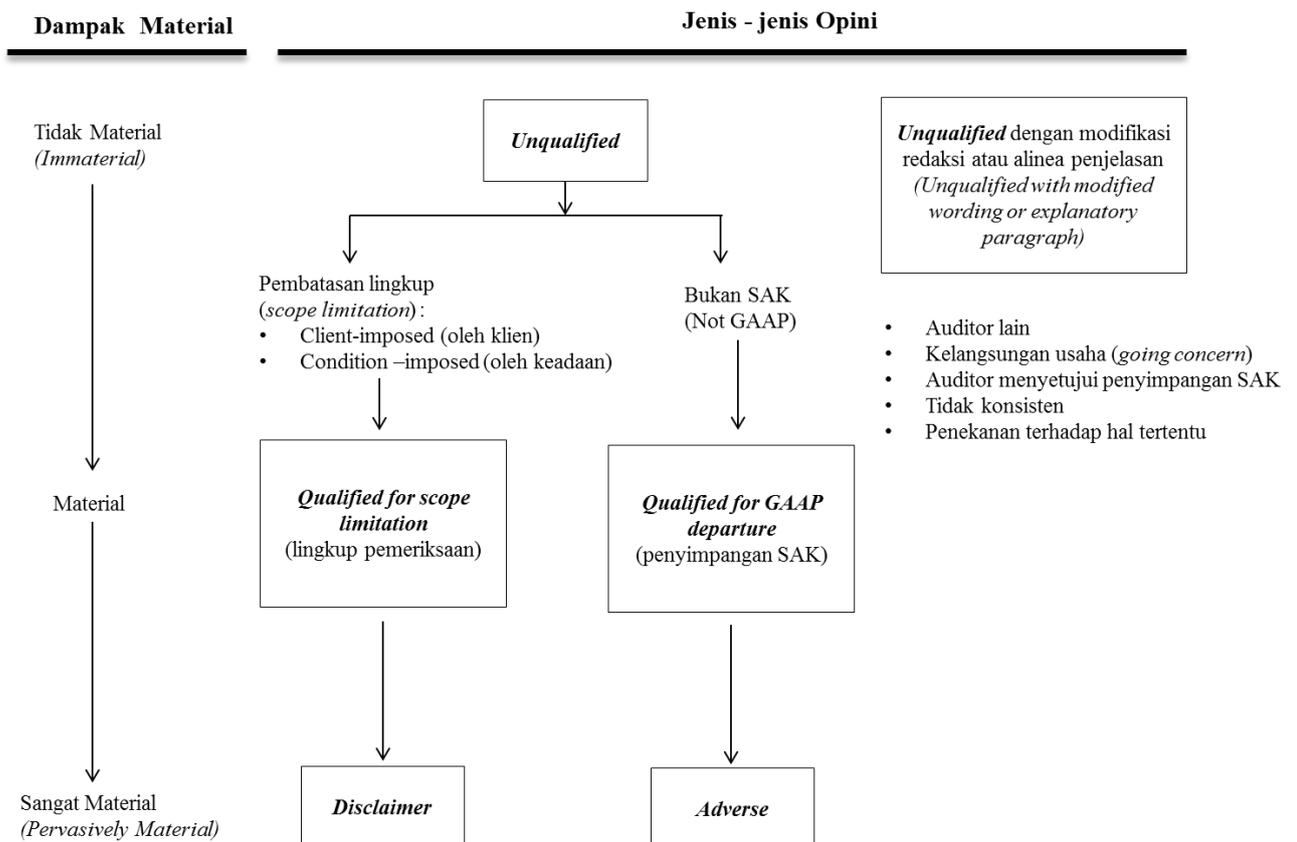
e. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika ia menghadapi pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit, sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan pendapat atas

laporan keuangan. Pendapat ini juga diberikan apabila auditor berada dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Messier, Jr. *et al* (2006) dalam Tuanakotta (2011) memberikan sistematika perumusan opini oleh auditor berdasarkan pada bukti-bukti audit yang telah diperoleh.

Gambar 2.2
Sistematika Perumusan Opini Audit



Sumber: William F. Messier, Jr. *et al* (2006) dalam Tuanakotta (2011)

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Isu mengenai *coporate governance* menjadi hal yang ramai diperbincangkan pasca berbagai kecurangan korporasi yang marak terjadi dan berdampak buruk pada perekonomian global. Sejak itu *coporate governance* menjadi bahan kajian untuk merumuskan berbagai kebijakan yang tepat bagi pengelolaan perusahaan. Penerapan kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi konflik dan mendorong keselarasan tujuan (*goal congruence*) antara pihak manajemen maupun pemilik untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan kelangsungan hidup perusahaan.

Sebagaimana dijelaskan oleh La Porta *et al* (1998), kebanyakan penelitian tentang *coporate governance* berfokus pada satu atau beberapa ekonomi yang maju seperti halnya Amerika, Jerman, atau Jepang. Selain itu, penelitian mengenai hubungan karakteristik *coporate governance* dengan kemungkinan perolehan opini audit *non-unqualified* juga jarang ditemui. Kebanyakan penelitian *coporate governance* adalah mengkaji seputar manajemen laba, peningkatan kinerja, pengungkapan *coporate governance*, faktor-faktor penentu perolehan opini audit dan hubungan *coporate governance* dengan perolehan opini *going concern*.

Penelitian mengenai kualifikasi audit dimulai oleh Dopuch *et al* (1987) . Penelitian tersebut berusaha memprediksi keputusan auditor untuk mengeluarkan opini *qualified* dengan berdasarkan pada variabel finansial dan pasar. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa keputusan auditor memberi opini *qualified* secara sistematis berhubungan dengan variabel finansial dan pasar. Model penelitian tersebut berguna bagi auditor untuk mengidentifikasi klien yang

berkemungkinan memperoleh opini audit *qualified* atau untuk menyaring klien yang potensial.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Chang dan Walter, 1996; Chen *et al*, 2001. Mereka berusaha menyelidiki apakah perusahaan yang telah menerapkan *coporate governance* dengan baik mempunyai peluang lebih besar menerima opini *non-qualified* daripada perusahaan-perusahaan lain. Chang dan Walter (1996) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan menerima opini audit *qualified* adalah perusahaan yang tergolong kecil, kurang menguntungkan, *liquid* dan mempunyai hutang yang besar jika dibandingkan dengan perusahaan yang menerima opini audit *non-qualified*. Hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa lebih mungkin suatu opini *qualified* akan dikeluarkan kepada perusahaan yang memiliki proporsi besar dalam hal kepemilikan modal oleh manajemen. Chen *et al* (2001) menemukan bahwa peluang untuk mendapatkan opini audit *qualified* menurun dengan meningkatnya kepemilikan manajemen dan pengendali oleh pihak luar.

Di Spanyol, Segura dan Molina (2001) dalam Ballesta (2005) menganalisa hubungan antara kemungkinan laporan audit *qualified* dan karakteristik-karakteristik perusahaan tertentu. Bukti empiris menunjukkan bahwa kerugian yang diderita perusahaan adalah faktor penting yang melatarbelakangi perolehan kualifikasi audit. Selain itu, ukuran perusahaan, sektor industri, auditor dan pendapatan luar biasa yang bersaldo negatif juga terlihat memiliki kekuatan eksplanatoris.

Penelitian ini merupakan ekspansi penelitian yang dilakukan oleh Ballesta dan Meca (2005) di Spanyol. Mereka berusaha menyelidiki hubungan karakteristik *coporate governance* terhadap kemungkinan perusahaan memperoleh opini audit *qualified*. Penelitian tersebut menggunakan sampel data sejumlah 32 observasi dari perusahaan-perusahaan dengan opini audit *qualified* di pasar modal Spanyol. Dari sampel tersebut selanjutnya dipasangkan dengan 32 sampel kontrol yaitu perusahaan-perusahaan yang menerima opini audit *unqualified*. Sehingga alat uji yang digunakan ialah regresi logistik dengan *matced pair design*. Hasil yang dicapai dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial yang tinggi menghasilkan struktur *coporate governance* yang lebih baik dan berdampak pada pelaporan keuangan yang lebih berkualitas. Dan oleh karenanya, akan menerima sedikit opini audit *qualified*. Sebaliknya, keikutsertaan anggota keluarga dalam dewan komisaris akan meningkatkan kemungkinan perusahaan menerima opini audit *qualified*.

Di berbagai literatur teoritis dan empiris biasanya mempertimbangkan mekanisme utama dari *coporate governance* adalah konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan manajerial. Selain itu, komposisi dewan komisaris komisaris juga berperan yang penting dalam kerangka perusahaan. Hal ini terkait tanggung jawab utamanya sebagai alat monitoring kinerja manajerial untuk memperoleh *return* yang cukup untuk pemegang saham. Penelitian ini mempertimbangkan beberapa variabel tersebut serta menambahkan variabel lain, yaitu kehadiran komite audit. Sehingga penelitian ini berusaha mengkaji pengaruh karakteristik *coporate governance* terhadap opini audit yang akan diterima perusahaan. Dengan

anggapan bahwa dibawah struktur *coporate governance* yang baik maka kualitas pelaporan keuangan akan meningkat dan pada akhirnya kemungkinan perusahaan untuk menerima opini audit *unqualified* lebih besar.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Variabel Penelitian | Alat Uji | Hasil Penelitian |
|----|---|---|--|--|
| 1 | Nicholas Dopuch, Robert W. Holthausen dan Richard W. Leftwitch (1987) | <i>Qualified audit report, financial and market variables</i> | Model Probit | Keputusan auditor terkait pemberian kualifikasi secara sistematis berhubungan dengan variabel finansial dan pasar/market. |
| 2. | Yoke-Kai Chang dan Terry S. Walter (1996) | <i>Qualified audit report, firm ownership, auditor type, sales, profitability, liquidity, debt levels</i> | Regresi logistik, <i>matched pair design</i> | Penerimaan opini audit <i>qualified</i> dipengaruhi oleh kepemilikan perusahaan, tipe auditor. Selain itu profitabilitas dan likuiditas berpengaruh negatif, sedangkan tingkat hutang berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit <i>qualified</i> . |
| 3. | Juan Pedro Sanchez Ballesta dan Emma Garcia Mecca (2005) | <i>Qualified audit report, blockholder ownership, insider ownership, family member, board size, ln sales, profitability, leverage and liquidity</i> | Regresi logistik, <i>matched pair design</i> | Konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan insider berpengaruh negatif, sedangkan keanggotaan keluarga berpengaruh positif pada perolehan opini audit <i>qualified</i> |
| 4. | Susiana dan Arleen Herawaty (2007) | Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, keberadaan komite audit, keberadaan komisaris independen, integritas laporan keuangan | Regresi berganda | Tahun 2000-2001 mekanisme <i>corporate governance</i> berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan Tahun 2002-2003 mekanisme <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan |

Di Indonesia, Susiana dan Herawaty (2007) meneliti tentang pengaruh independensi, mekanisme *corporate governance* dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian tersebut mempertimbangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, keberadaan komite audit dan keberadaan komisaris independen sebagai mekanisme *corporate governance*. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 200-2003. Penelitian tersebut memberikan bukti bahwa selama tahun 2000-2001 mekanisme *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan sedangkan di tahun 2002-2003 mekanisme *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.2.1 Konsentrasi Kepemilikan

Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh di antara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Para peneliti berpendapat bahwa struktur kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan. Pemilik mempunyai kekuasaan untuk menentukan arah dan tujuan perusahaan sehingga peran pemilik sangat penting dalam menentukan keberlangsungan perusahaan.

Berdasarkan besar kecilnya distribusi kepemilikan saham, maka dapat diidentifikasi dua macam bentuk struktur kepemilikan: kepemilikan terkonsentrasi, dan kepemilikan menyebar. Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang

relatif dominan dibandingkan dengan lainnya. Sedangkan kepemilikan saham menyebar terjadi jika kepemilikan saham menyebar secara relatif merata ke publik, tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah sangat besar dibandingkan dengan lainnya (Dallas, 2004). Kepemilikan terkonsentrasi merupakan fenomena yang lazim ditemukan di negara dengan ekonomi sedang bertumbuh seperti *Continental Europe* dan di negara-negara *Civil Law*. Sebaliknya, di negara-negara *Anglo Saxon* dengan perlindungan investor yang kuat, seperti Inggris dan Amerika Serikat, maka struktur kepemilikan relatif sangat menyebar (De Miguel *et al*, 2003).

Dari sudut pandang teoritis, kepemilikan terkonsentrasi dapat memainkan peran yaitu mengurangi masalah agensi antara pihak pemegang saham dengan manajemen. Namun penelitian terkini menegaskan bahwa kepemilikan saham terkonsentrasi yang besar dapat menimbulkan masalah agensi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas (Shleifer and Vishny, 1997). Dampak positif yang ditimbulkan dari konsentrasi kepemilikan adalah bahwa pemegang saham mayoritas mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk melaksanakan fungsi monitoring dan kontrol terhadap pihak manajemen (Jensen and Meckling, 1976; La Porta, 1997).

Namun sebaliknya juga terdapat dampak negatif dari kepemilikan terkonsentrasi yaitu jika pemegang saham mayoritas bertindak oportunistik dengan cara memaksimalkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan pemegang saham minoritas (Fama and Jensen, 1983; Shleifer and Vishny, 1997). Pendapat kedua tersebut akan sangat relevan jika dihubungkan

dengan kondisi perusahaan di Indonesia. Dimana karakteristik utama yang muncul adalah kepemilikan terkonsentrasi/sistem piramidal dan kepemilikan keluarga (Classens *et al* 1999b dan 2000 dalam Hardinata, 2008). Dengan kepemilikan terkonsentrasi yang sedemikian tinggi maka dikhawatirkan pemegang saham mayoritas memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mengeksploitasi perusahaan yang dikontrolnya.

H1 : Konsentrasi kepemilikan memiliki hubungan positif dengan kemungkinan memperoleh opini audit *non-unqualified*

2.2.2 Kepemilikan Manajerial

Penelitian yang dilakukan oleh Jensen and Meckling (1976) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik agensi. Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Dan ketika kepemilikan manajerial rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya oportunistik manajemen akan meningkat.

Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antar manajer dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan

ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Argumen tersebut mengindikasikan mengenai pentingnya kepemilikan manajerial dalam struktur kepemilikan perusahaan.

Namun, tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi juga dapat berdampak buruk terhadap perusahaan. Dengan kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer mempunyai hak voting yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan, hal ini dapat menimbulkan masalah pertahanan, dalam artian, adanya kesulitan bagi para pemegang saham eksternal untuk mengendalikan tindakan manajer.

H2 : Kepemilikan manajerial berhubungan negatif dengan kemungkinan memperoleh opini audit *non-unqualified*

2.2.3 Independensi Dewan Komisaris

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen, yaitu berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Pembentukan komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Keberadaan komisaris independen menyediakan keahlian dan pemahaman yang baik tentang perusahaan dan bisnis, sehingga memegang peranan yang penting terhadap perlindungan *stakeholders* perusahaan (Peraturan BEJ No. Kep-339./BEJ/07-2001).

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (*National Code for Good Corporate Governance*, 2001). Selain mensupervisi dan memberi nasihat pada dewan direksi sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate Governance* (NCCG) 2001 adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan *good corporate governance*.

Beasley (1996; dalam Marihhot dan Nasution, 2007) menyatakan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan komisaris tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. Melalui peranan dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan oleh pihak manajemen, komposisi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris lebih penting untuk mengurangi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, daripada kehadiran komite audit.

H3 : Komisaris independen memiliki hubungan negatif dengan kemungkinan memperoleh opini audit *non-unqualified*

2.2.4 Komite Audit

Salah satu mekanisme *coporate governance* untuk mewujudkan transparansi atas pengelolaan perusahaan perusahaan adalah melalui keberadaan komite audit. Keberadaan komite audit dinilai penting bagi struktur pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu, komite audit juga bertugas menjembatani kepentingan antara pemegang saham dan dewan komisaris komisaris dengan pihak manajemen.

Di Indonesia, keharusan untuk membentuk komite audit bagi perusahaan publik ditetapkan oleh Surat Edaran Bapepam No: SE-03/PM/2000; dan Surat Direksi BEJ No: Kep. 339/BEJ/07-2001. Regulasi tersebut mewajibkan perusahaan membentuk komite audit sebagai sub-komite dari fungsi dewan komisaris komisaris yang diharapkan berfungsi efektif dalam hal-hal yang terkait dengan proses dan peran audit bagi perusahaan terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan yang dipaparkan untuk publik (Alijoyo, 2003).

Berdasarkan Surat Edaran Bapepam (SE-03/PM/2000), mensyaratkan pembentukan komite audit di perusahaan publik Indonesia yang terdiri dari

sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Sedangkan dalam Surat Edaran BEJ (SE-008/BEJ/12-2001), diatur keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Dalam artikel yang diterbitkan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yaitu “Peranan Dewan komisaris Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance*”, dinyatakan bahwa peran dan tanggung jawab komite audit meliputi tiga bidang, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi keuangan, hasil usaha dan rencana serta komitmen jangka panjang. Untuk itu ruang lingkup pelaksanaan bidang ini antara lain :

- a. Merekomendasikan auditor eksternal
- b. Memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan auditor eksternal

- c. Menilai kebijakan akuntansi dan keputusan-keputusan yang menyangkut kebijaksanaan
- d. Meneliti laporan keuangan

2. Tata Kelola Perusahaan (*Coporate Governance*)

Komite audit memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

Untuk itu ruang lingkup pelaksanaan bidang ini antara lain :

- a. Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan, dan penyelidikan terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan
- b. Memonitor proses pengendalian yang sedang terjadi ataupun yang ditunda serta menyangkut masalah *coporate governance* dalam hal dimana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terkait di dalamnya
- c. Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan merugikan perusahaan dan kecurangan
- d. Keharusan auditor internal untuk melaporkan hasil pemeriksaan *coporate governance* dan temuan-temuan penting lainnya

3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Komite audit harus memiliki pemahaman mengenai masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup pelaksanaan bidang ini meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga, konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi.

Penelitian mengenai hubungan karakteristik komite audit dan kualitas pelaporan keuangan menemukan hasil yang konsisten bahwa anggota komite yang independen dan memiliki keahlian mengenai keuangan dan akuntansi berhubungan dengan kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

Penelitian Carcello and Neal (2000) menguji hubungan antara komposisi komite audit dari perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan kemungkinan memperoleh opini *going concern*. Menemukan bahwa jika terdapat persentase yang lebih besar dari direktur yang tergabung dalam komite audit maka terdapat kemungkinan rendah auditor akan memberi opini *going concern*. Komposisi yang besar dari direktur dalam komite audit akan menimbulkan campur tangan dalam proses audit untuk menghasilkan laporan audit. Sehingga diperkirakan melalui komite audit yang independen akan lebih mampu untuk

mengatasi tekanan manajemen apapun bagi auditor untuk menghasilkan laporan audit yang bersih.

Penelitian lain mengenai komite audit diantaranya penelitian oleh Davidson, Xie dan Xu (2004) yang dijelaskan dalam Marihot dan Setiawan (2007). Penelitian tersebut menganalisis reaksi pasar terhadap pengumuman penunjukan anggota komite audit secara sukarela. Hasil yang diperoleh dari menunjukkan bahwa pasar bereaksi positif terhadap pengumuman penunjukan anggota komite audit terutama yang ahli di bidang keuangan. Di Indonesia, Wilopo (2004) menganalisis hubungan dewan komisaris komisaris independen, komite audit, kinerja perusahaan dan akrual diskresioner. Dari penelitian tersebut dilaporkan bahwa kehadiran komite audit dan dewan komisaris komisaris independen mampu mempengaruhi secara negatif praktik manajemen laba di perusahaan. Hal ini menandakan bahwa mekanisme corporate governance diatas penting untuk menjamin terlaksananya praktik perusahaan yang adil dan transparan.

H4 : Komite audit memiliki hubungan negatif dengan kemungkinan memperoleh opini audit *non-unqualified*.

2.2.5 Ukuran Dewan komisaris

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak (Fama dan Jensen, 1983). Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan

nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance* (Komite Nasional Corporate Governance , 2006).

Berbagai penelitian tentang *coporate governance* melihat ukuran dewan komisaris sebagai suatu mekanisme yang penting untuk memonitor kerja manajemen. Menurut Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2006) semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executives Officer* (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen.

Menurut Jensen (1993) menyatakan bahwa dengan ukuran dewan komisaris yang besar mampu memberi kemampuan monitoring yang kuat dan membimbing pada kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik. Namun sebaliknya, ukuran dewan komisaris yang besar dapat pula mengakibatkan buruknya kemampuan untuk berkomunikasi, koordinasi dan monitoring, menyebabkan dewan komisaris menjadi kurang efektif dan pada akhirnya menghasilkan kualitas pelaporan keuangan yang buruk.

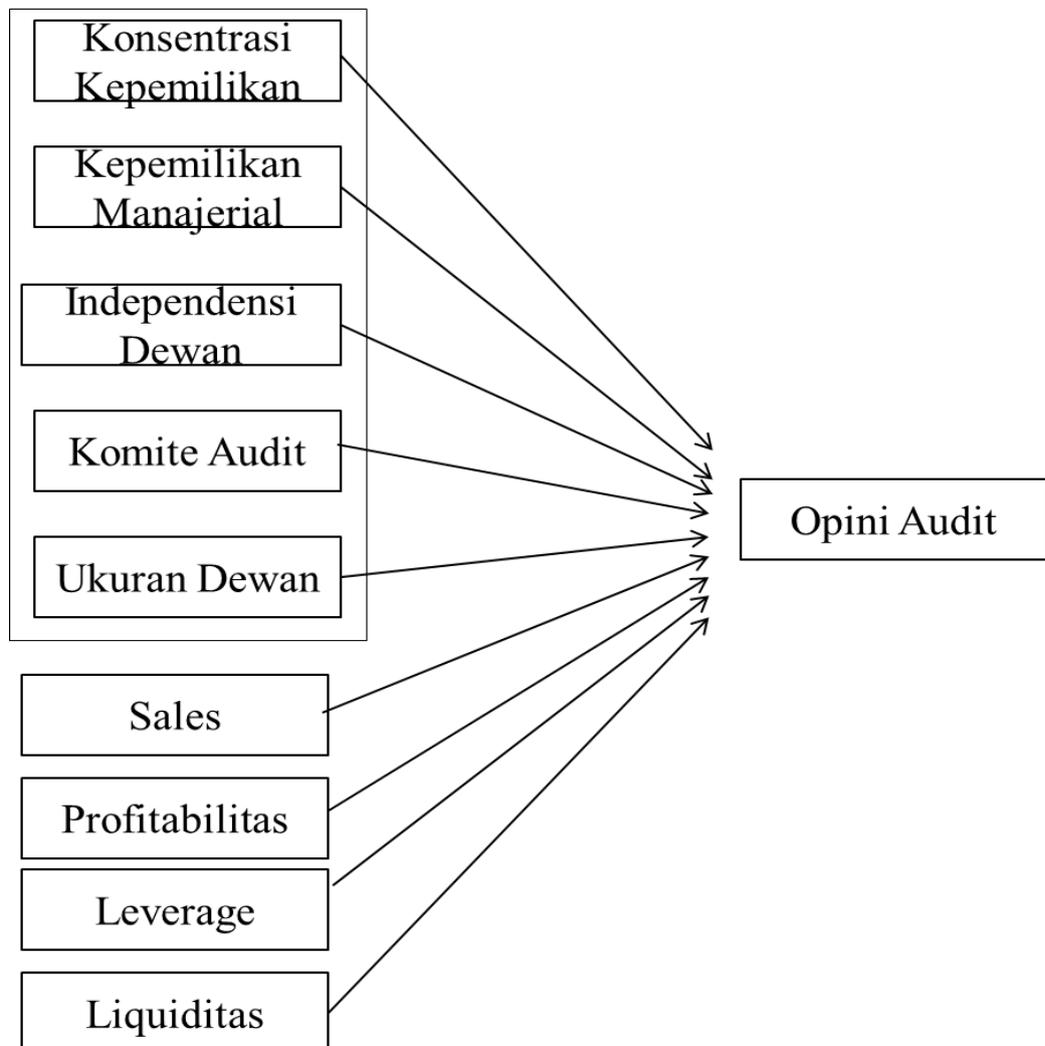
H5 : Dewan komisaris memiliki hubungan negatif dengan kemungkinan memperoleh opini audit *non-unqualified*

2.3 Model Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk menganalisa kepemilikan dan struktur dewan komisaris dari seluruh perusahaan non-keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) kurun waktu 2001-2010, yang mendasari pengaruh pada opini audit yang diterima perusahaan. Dalam hal tertentu, menyelidiki pula apakah

kualifikasi audit dipengaruhi oleh konsentrasi dan struktur kepemilikan serta komposisi dewan komisaris.. Selain itu dipertimbangkan pula variabel komite audit sebagai hal baru dalam *coporate governance*.

Gambar 2.3
Model Penelitian
Analisis Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap Penerimaan
Opini Audit *Non-Unqualified*



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Defrinesi Operasional Variabel

Variabel adalah segala sesuatu yang memiliki perbedaan atau memiliki nilai yang bervariasi. Nilai tersebut dapat berbeda pada berbagai waktu untuk suatu objek yang sama, atau pada suatu waktu yang sama untuk berbagai objek yang berbeda (Sekaran, 2006).

Variabel umum yang digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan opini audit adalah sebagai berikut :

3.1.1 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel Bebas (*independen variable*) adalah segala sesuatu yang mampu mempengaruhi variabel terikat dalam bentuk hubungan, baik positif maupun negatif (Sekaran, 2006).

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, independensi dewan komisaris, komite audit, dan ukuran dewan komisaris.

3.1.1.1 Konsentrasi Kepemilikan

Kepemilikan saham terkonsentrasi adalah suatu kondisi di mana sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu/kelompok, sehingga individu atau kelompok tersebut memiliki jumlah saham relatif dominan

dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Besarnya konsentrasi kepemilikan diukur dari proporsi kepemilikan saham terbesar yang dimiliki oleh pemegang saham individu/kelompok (Ballesta dan Meca, 2005).

3.1.1.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial ialah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari keseluruhan modal saham yang dikelola perusahaan. Besarnya kepemilikan manajerial diukur dari proporsi modal saham yang dimiliki oleh pihak manajemen (Ballesta dan Meca, 2005). Menurut Jensen dan Meckling (1976), perbedaan kepentingan dan tindakan oportunistik manajemen terkait dengan pemecahan kepemilikan, sejak kepemilikan manajerial bertindak sebagai alat monitoring yang membimbing kearah kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

3.1.1.3 Independensi Dewan Komisaris

Independensi dewan komisaris digambarkan oleh jumlah komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, 2004). Berdasarkan Keputusan Direksi PT.Bursa Efek Jakarta No.Kep-315/BEJ/06-2000, bahwa

perusahaan harus memiliki sekurang-kurangnya 30% komisaris independen dari seluruh jumlah anggota komisaris. Variabel independensi dewan komisaris diukur dari proporsi komisaris independen yang terdapat dalam struktur dewan komisaris perusahaan (Siregar, 2005).

$$\text{Independensi dewan} = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris berasal dari luar}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

3.1.1.4 Komite Audit

Variabel komite audit merupakan proksi dari ada tidaknya komite audit pada perusahaan, sehingga dikategorikan sebagai variabel biner/*dummy*. Pengukuran variabel ini dengan memberi nilai 1 pada perusahaan yang memiliki komite audit dan nilai 0 pada perusahaan yang tidak memiliki komite audit (Siregar, 2005).

3.1.1.5 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris mencerminkan jumlah seluruh anggota pada struktur dewan komisaris perusahaan. Variabel ini diukur dengan menghitung berapa orang dalam struktur dewan komisaris, meliputi presiden komisaris, komisaris non-independen dan komisaris independen (Ballesta dan Meca, 2005).

3.1.2 Variabel Terikat (*Dependent*)

Variabel Terikat (*dependent*) adalah variabel yang menjadi minat utama dari para peneliti. Dengan kata lain, tujuan para peneliti ialah untuk mengerti

dan menggambarkan variabel terikat, menjelaskan variabilitasnya ataupun memprediksikan variabel tersebut (Sekaran, 2006).

Penelitian ini menggunakan variabel terikat berupa variabel *dummy*, yaitu variabel yang bersifat kategorikal atau dikotomi (Ghozali, 2006). Variabel terikat yang dimaksud ialah opini audit. Dimana kategori 0 diberikan untuk opini audit wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dan kategori 1 untuk opini audit selain wajar tanpa pengecualian (*non-unqualified opinion*).

Sebuah opini wajar tanpa pengecualian mengindikasikan bahwa laporan keuangan klien menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Termasuk dalam opini ini antara lain opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dan opini wajar tanpa pengecualian disertai bahas penjelas (*unqualified opinion with explanatory paragraph*). Sedangkan untuk opini uaudit *non-unqualified opinion* termasuk diantaranya opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adverse opinion*) dan opini tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*).

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel Kontrol adalah variabel yang dapat dikendalikan sehingga hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti (Jazuli, 2002). Variabel kontrol digunakan

karena terdapat beberapa variabel di luar *corporate governance* yang mungkin mempengaruhi penerimaan opini audit.

3.1.3.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang cerminkan oleh penjualan bersih tahunan perusahaan. Penjualan bersih tahunan ialah sejauh mana produk yang dihasilkan perusahaan mampu diserap oleh pasar sehingga menggambarkan kekuatan bersaing perusahaan memperebutkan pangsa pasar dari produk yang dihasilkan (Margaretha, 2005).

3.1.3.2 Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan ukuran dari kinerja perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba sehubungan dengan total asset yang dimiliki perusahaan. Rasio leverage diketahui dengan membandingkan penerimaan sebelum pajak dengan total asset perusahaan (Margaretha, 2005)

$$\textit{Profitabilitas} = \frac{\textit{Laba sebelum pajak}}{\textit{Total asset}}$$

3.1.3.3 Leverage

Rasio leverage menekankan pentingnya pendanaan hutang bagi kelangsungan hidup perusahaan. Rasio ini menunjukkan prosentase asset yang didukung oleh pendanaan hutang, sehingga rasio leverage diketahui

dengan membandingkan total hutang dengan total asset perusahaan (Margaretha, 2005). Hubungan yang positif dengan kualifikasi audit diperkirakan karena merupakan suatu proksi dari resiko perusahaan. Chang dan Walter (1996) menyatakan bahwa jika resiko keuangan dari perusahaan meningkat, maka auditor akan lebih waspada dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini mengakibatkan prosedur audit yang disusun akan lebih akurat, sehingga memiliki peluang besar untuk menemukan kesalahan akuntansi dan pelaporan klien.

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total asset}}$$

3.1.3.4 Likuiditas

Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas diketahui dengan membandingkan asset lancar dan kewajiban lancar (Margaretha, 2005). Penelitian sebelumnya menyimpulkan adanya hubungan negatif antara profitabilitas dan likuiditas dengan kualifikasi audit. Karena dalam sudut pandang auditor, rasio yang kecil mengartikan bahwa perusahaan memiliki kemungkinan besar untuk gagal (Chang dan Walter, 1996).

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Asset lancar}}{\text{Hutang lancar}}$$

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dan sampel tidak dapat terlepas dari setiap penelitian ilmiah, karena acuan data bagi tercapainya tujuan penelitian ilmiah adalah berasal dari populasi dan sampel yang digunakan. Jazuli (2002), mendefinisikan populasi adalah keseluruhan objek atau kumpulan objek dengan ciri atau karakteristik yang sama.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah seluruh perusahaan manufaktur yang telah *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun periode 2001 - 2010. Penelitian ini tidak mengikutsertakan perusahaan keuangan karena perusahaan tersebut memiliki karakteristik spesifik dalam rasio keuangan mereka.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah himpunan atau kelompok yang lebih kecil bagian dari populasi yang digunakan untuk penelitian (Jazuli, 2002). Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah perusahaan manufaktur yang telah *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun periode 2001 – 2010 yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Menurut Jazuli (2002) metode *purposive sampling* ialah menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Penggunaan metode *purposive sampling* ini dimaksudkan agar dapat mewakili populasinya dan tidak menimbulkan bias bagi tujuan penelitian.

Beberapa kriteria menjadi pertimbangan dalam pemilihan sampel secara *purposive sampling* adalah sebagai berikut :

- (1) Perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2001-2010 dan mempunyai tahun buku yang berakhir 31 Desember pada tiap periodenya.
- (2) Perusahaan melampirkan laporan keuangan *audited* di BEI.
- (3) Perusahaan dipilih jika memiliki minimal satu opini audit *non-qualified* dalam periode 2001-2010
- (4) Selanjutnya sampel yang terkumpul dipasangkan dengan sampel kontrol, yaitu perusahaan yang mempunyai opini audit *unqualified* pada tahun 2001-2010
- (5) Pemilihan sampel kontrol berdasarkan pertimbangan jenis industri yang sama. Jika tidak didapati maka sampel kontrol ialah perusahaan dengan jumlah penjualan yang mendekati jumlah penjualan sampel utama.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang bersumber dari eksternal peneliti. Data tersebut berupa laporan keuangan *audited* perusahaan manufaktur *go public* yang terdaftar di BEI selama periode 2001-2010 dan telah dipublikasikan melalui situs terkait. Disamping itu digunakan pula data dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) tahun 2005, 2006, 2007 dan 2011 untuk menambah kelengkapan data.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari catatan atau dokumen-dokumen perusahaan sesuai dengan data yang diperlukan. Metode dokumentasi memungkinkan peneliti untuk menyelidiki sumber-sumber informasi lain yang berupa benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, regulasi, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdapat dalam laporan keuangan *audited* perusahaan sampel yang tersedia pada situs BEI. Untuk menunjang kelengkapan data digunakan pula informasi yang tersedia pada *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)*.

3.5 Metode Analisis

Berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya diolah dan dianalisis agar data tersebut dapat memberikan keterangan yang dapat dipahami, jelas, dan detail terkait hasil penelitian. Berikut metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini :

3.5.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum dari tiap variabel penelitian. Analisis tersebut meliputi penghitungan nilai rata-rata (mean), nilai maksimum dan nilai minimum untuk menggambarkan variabel

konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, independensi dewan komisaris, komite audit, ukuran dewan komisaris serta variabel kontrol.

3.5.2 Analisis Regresi Logistik

Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan alat uji regresi logistik. Analisis regresi logistik dipilih karena variabel bebas yang terdapat dalam penelitian ini berupa campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorikal (non-metrik). Sehingga asumsi *multivariate normal distribution* tidak dapat dipenuhi dan oleh karenanya tidak memerlukan asumsi normalitas data pada variabel bebasnya (Ghozali, 2006).

Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu, variabel-variabel penelitian yang digunakan, dan data penelitian, maka bentuk persamaan regresi logistik dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Op_Aud} = & \beta_0 + \beta_1 \text{Block_Own} + \beta_2 \text{Manj_Own} + \beta_3 \text{Ind_Board} + \beta_4 \\ & \text{Com_Aud} + \beta_5 \text{Board_Size} + \beta_6 \text{Sales} + \beta_7 \text{Pro} + \beta_8 \text{Lev} + \\ & \beta_9 \text{Liq} + \varepsilon \end{aligned}$$

Keterangan :

1. Op_Aud : Jenis opini audit yaitu *non-unqualified* dan *unqualified*
2. Block_Own : Konsentrasi kepemilikan yaitu proporsi saham terbesar
3. Manj_Own : Proporsi saham yang dikuasai manajemen
4. Ind_Board : Proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar
5. Com_Aud : Keberadaan komite audit

6. Board_Size : Jumlah anggota dewan komisaris
7. Sales : Jumlah dari penjualan bersih tahunan
8. Pro : Profitabilitas yaitu laba sebelum pajak dibagi total asset
9. Lev : Leverage total hutang dibagi total asset
10. Liq : Likuiditas yaitu asset lancar dibagi hutang lancar

Dari hasil analisis regresi, selanjutnya peneliti akan menganalisis hasil tersebut untuk mengetahui apakah hipotesis yang dirumuskan diterima atau ditolak. Menurut Ghozali (2009), analisis terhadap hasil regresi dilakukan melalui beberapa langkah berikut.

1. Menilai model fit

Untuk menilai kelayakan model terhadap data maka digunakan beberapa teknik statistik, antara lain :

a. Cox dan Snell's R Square serta Nagelkerke's R Square.

Nilai *Cox dan Snell's R Square serta Nagelkerke's R Square* menunjukkan seberapa besarkah variabilitas variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas

b. Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test.

Tes ini menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit. Data memiliki model fit baik jika *p-value Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* lebih besar dari 0,05. Ini berarti model mampu

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

2. Estimasi Parameter dan Interpretasi

Estimasi kemungkinan parameter dari model dapat dilihat pada tampilan output *variable in the equation*. Pada tabel tersebut terdapat nilai uji wald untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel independen yang masuk kedalam model. Apabila nilai uji wald terlihat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka koefisien regresi adalah signifikan pada tingkat kepercayaan 5%. Dengan uji wald maka dapat diketahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap kemungkinan perusahaan memperoleh opini audit *non-qualified*.